

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENANGGULANGAN STUNTING MELALUI PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI DESA LARANGAN KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

Tarissa Putri Alfadinda¹, Lailul Mursyidah²

¹²Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Abstract

This research aims to analyse and describe the village government's strategies for addressing stunting through the stunting reduction acceleration program in Larangan Village. The technique used is qualitative descriptive, divided into primary and secondary data. This research focuses on the village government's strategy to address stunting risk cases through the stunting acceleration reduction program. The findings of this study outline that the village government's strategy in addressing stunting is not yet optimal. This is due to the absence of a Stunting Acceleration Team (TPPS) responsible for monitoring the implementation of stunting reduction at the village level, the lack of tools to monitor toddler growth and development, and insufficient socialization about stunting in the village community. The village government's strategy of carrying out stunting mitigation activities through the implementation of providing supplementary feeding budgets (PMT), improving the provision of clean water and sanitation, and holding classes for pregnant women.

Keywords: Village Governance, Stunting Reduction, Stunting Mitigation Strategy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi pemerintah desa dalam penanggulangan stunting melalui program percepatan penurunan stunting di Desa Larangan. Teknik yang digunakan ialah deskriptif kualitatif yang terbagi menjadi data primer serta data sekunder. Fokus penelitian ini adalah strategi pemerintah desa untuk menanggulangi kasus risiko stunting melalui program percepatan penurunan stunting. Temuan studi ini menjabarkan strategi pemerintah desa pada penanggulangan stunting belum maksimal, hal tersebut diakibatkan belum terbentuknya tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang berkewajiban untuk mengamati penyelenggaraan percepatan penurunan stunting pada tingkat desa, kurangnya alat untuk memantau tumbuh kembang balita, kurangnya sosialisasi tentang stunting kepada masyarakat desa. Dengan strategi pemerintah desa dengan melangsungkan aktivitas penanggulangan stunting melalui pelaksanaan memberikan anggaran pemberian makanan tambahan (PMT), peningkatan penyediaan air bersih dan sanitasi dan mengadakan kelas ibu hamil.

Kata Kunci: Pemerintahan Desa, Penurunan Stunting, Strategi Penanggulangan Stunting

Article history:

Submission: August 16, 2024

Revised: September 08, 2024

Accepted: November 11, 2024

Published: December 05, 2024

**Corresponding author*

Email:

tarissaalfadinda09@gmail.com

PENDAHULUAN

Penurunan prevalensi stunting yang telah menjadi perhatian dunia dan menjadi salah satu masalah yang menghambat pertumbuhan balita, saat ini menjadi perhatian utama dunia internasional. Menurut Balitbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2018), Stunting adalah situasi tidak berkembang yang timbul akibat kekurangan gizi kronis berkepanjangan. Masalah ini biasanya terjadi pada periode yang sangat penting, yaitu 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang mencakup periode kehamilan sampai anak berumur 2 tahun setelah lahir. Stunting mempengaruhi 150,8 juta orang di seluruh dunia (22,2%) (Asmawati et al., 2023).

Diantara tujuh belas SDGs yang bertujuan untuk memperbaiki dunia adalah *zero hunger*. *Zero hunger* sebagai akibat dari munculnya beberapa masalah mendasar seputar kelaparan. Menurut data statistik Kementerian Kesehatan, Indonesia memiliki masalah kelaparan yang besar di tahun 2023 dengan indeks kelaparan sebesar 27,5%. Indonesia berada dalam situasi yang lebih buruk daripada Vietnam, Malaysia, dan Thailand di ASEAN. Sulit untuk membedakan antara gizi kurang dengan gizi buruk dengan kendala kelaparan itu sendiri. Masalah gizi kurang dan gizi buruk telah menarik banyak perhatian akhir-akhir ini, terutama dalam hal gizi buruk akut yang mengakibatkan wasting dan gizi buruk kronis yang menyebabkan stunting.

Kelaparan adalah masalah yang dapat menyebabkan banyak masalah lainnya, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) kedua bertujuan untuk memberantas kelaparan *zero hunger* sesegera mungkin. Mendorong pertanian berkelanjutan, mencapai ketahanan pangan, dan mengakhiri kelaparan adalah tujuan utama dari poin nomor dua. Sejumlah inisiatif telah diambil untuk membantu mencapai tujuan tersebut. Mengedukasi masyarakat tentang cara mengakhiri kelaparan dengan pola makan yang sehat dan makanan yang aman, mengakhiri malnutrisi, dan menurunkan jumlah balita yang mengalami stunting.

Sebagai negara kepulauan yang luas, Indonesia dihadapkan pada berbagai permasalahan, dengan status gizi yang menjadi salah satu isu utama. Status gizi yang merupakan kunci dalam menentukan kualitas sumber daya manusia, memerlukan penanganan segera untuk memastikan individu dapat mencapai potensi maksimal mereka. Permasalahan gizi yang kompleks ini mempengaruhi setiap tahap siklus kehidupan, dari bayi dalam kandungan hingga lanjut usia, dan dampaknya perlu ditangani secara serius (Nur Azizah, Nastia, 2022).

Masalah gizi serius yang dapat berdampak terhadap kesejahteraan sosial serta ekonomi adalah stunting (Normaisa, Mahsyar, & Sudarmi, 2021). Gizi buruk yang kronis menyebabkan terjadinya stunting pada anak balita di 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), sehingga mengganggu tumbuh kembang dan membuatnya lebih mudah terserang penyakit. Anak-anak yang mengalami stunting sering menunjukkan pertumbuhan yang tidak sesuai standar nasional, seperti rendahnya tinggi badan yang tercatat dalam Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Dampak jangka panjang dari stunting dapat mempengaruhi produktivitas di masa dewasa dan meningkatkan risiko terjadinya penyakit kronis (Rahman, Rahmah, & Saribulan, 2023).

Di Indonesia, sekitar 17% anak dilaporkan mengalami stunting, berdasarkan statistik dari Survei Status Gizi Nasional (SSGI) yang dirilis pada tahun 2023. Sementara itu, dalam 2022, prevalensi stunting pada kalangan penduduk menggapai 21,6%. Jika disandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni 2021, di mana angka stunting mencapai 24,4%, terdapat penurunan yang cukup signifikan. Meskipun demikian, angka tersebut masih tergolong tinggi, mengingat kriteria yang ditentukan oleh WHO menyatakan bahwa kejadian stunting seharusnya berada di

bawah 20%. Sasaran yang ditetapkan untuk kejadian stunting di Indonesia di 2024 ialah 14%. Kondisi ini menggambarkan Indonesia mempunyai beragam tugas yang perlu dituntaskan dalam hal penanggulangan stunting (Priyono, 2020).

Dalam upaya mempercepat pengentasan stunting, pemerintah sudah mengeluarkan PERPRES Nomor 72 Tahun 2021, mengenai Percepatan Penurunan Stunting. Kebijakan ini menggambarkan strategi yang komprehensif, terintegrasi, dan berkualitas tinggi dalam menangani masalah stunting. Untuk memastikan bahwa upaya penurunan angka stunting dapat dilaksanakan secara efektif, peraturan tersebut menekankan pentingnya kolaborasi, koordinasi, dan sinkronisasi yang baik antar lembaga, provinsi, kabupaten/kota, desa, dan pemangku kepentingan sebagainya. Selain itu, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan program ini. Dengan pendekatan yang terencana dan terpadu, diharapkan langkah-langkah yang diambil dapat membawa hasil yang nyata dalam menanggulangi permasalahan stunting di masyarakat (R. M. Lestari & Winatasari, 2023).

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan urutan ke 25 dari 34 provinsi dalam persoalan stunting pada balita. Merujuk pada SSGI Tahun 2022, di Provinsi Jawa Timur angka stunting sebesar 19,2%. Jawa Timur menargetkan penurunan prevalensi stunting hingga 16% pada tahun 2023. Maka, persoalan ini harus menjadi salah satu perhatian yang utama terhadap pemerintah agar terjadi penurunan kembali. Penanganan multisektor masalah stunting di Jawa Timur sangat diperlukan. Penanganan multisektor melibatkan penetapan target yang jelas, penggunaan anggaran yang bijaksana, penempatan lokasi program untuk dilaksanakan, melakukan survei stunting setiap tahun dan melakukan pengawasan masyarakat. Enam hal penyebab stunting di Jawa Timur adalah tindakan pengasuhan yang tidak optimal, minimnya fasilitas medis seperti layanan pemeriksaan kehamilan (Antenatal Care), pemeriksaan ibu dan bayi setelah persalinan (Post Natal Care) dan pembelajaran dini yang berkualitas. Selain itu, masalah lain termasuk kekurangan makanan bergizi, akses terbatas terhadap air bersih, dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai stunting (Viona Erlanda & Dida Rahmadanik, 2023).

Kabupaten Sidoarjo, yang terletak di Provinsi Jawa Timur, telah diidentifikasi sebagai kabupaten prioritas dalam upaya mengurangi angka stunting pada tahun 2022. Untuk memperluas cakupan intervensi yang terintegrasi di berbagai kabupaten dan kota, pemerintah mengacu pada Keputusan Kementerian PPN No. Kep.10/M.PPN/HK/02/2021, yang menjadi kerangka kerja bagi pengentasan stunting. Wilayah dengan tingkat stunting terbesar di Kabupaten Sidoarjo adalah Kecamatan Candi. Pada RPJMD yang dicetuskan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo untuk periode 2016-2021, ditargetkan penurunan angka stunting sebesar 26,2% serta peningkatan pemberian ASI eksklusif hingga mencapai 65%. Namun, data yang diperoleh dari Puskesmas Candi menunjukkan bahwa dalam 2019, peringkat penyaluran ASI eksklusif hanya mencapai 47,7%, yang menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam mencapai target yang telah ditetapkan (Dinkes Kab. Sidoarjo, 2019) (Pujiastuti et al., 2021). Peningkatan pada jumlah kasus stunting di Sidoarjo dibuktikan dengan tabel dibawah:

Tabel 1. Data Kasus Stunting di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2022

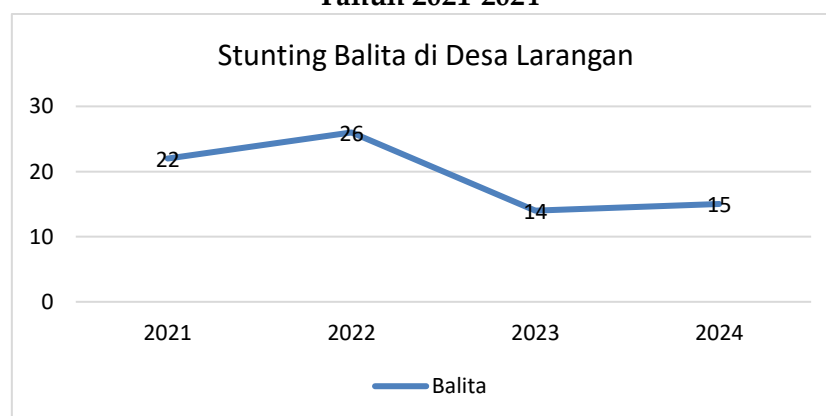
No.	Tahun	Under Weight (BB/U)	Wasting (BB/TB)
1.	2019	8,3%	9,5%
2.	2020	7,2%	7,0%
3.	2021	8,1%	7,9%
4.	2022	8,4%	8,2%

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Sidoarjo, 2024

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan berbagai upaya untuk mengatasi masalah stunting dan wasting, yang mencakup penyediaan makanan tambahan (PMT) bagi bayi, sosialisasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif, serta promosi praktik hidup bersih dan sehat (PHBS). Pemerintah mengembangkan fasilitas daring seperti Lestari, SiCantik, dan BKB Emas untuk mendukung upaya ini (Dinkes Kab. Sidoarjo, 2020). Namun, meskipun berbagai tindakan telah diambil, hasil yang dicapai dalam pengelolaan masalah stunting dan wasting masih belum optimal (Pujiastuti et al., 2021).

Stunting yang dijumpai pada anak bisa diakibatkan oleh berbagai aspek, seperti genetik, kekurangan gizi baik ketika hamil atau sesudah melahirkan, penyakit yang berulang, serta ketidaktahuan orang tua mengenai tahapan tumbuh kembang anak. Anak-anak yang mengalami stunting berkemungkinan lebih besar terkena gangguan degeneratif seiring bertambahnya usia dan lebih mudah mengidap penyakit. Oleh karena itu, fungsi Pemerintah Desa sangat krusial dalam mencegah serta mengatasi stunting, apalagi merujuk pada target pencapaian negara sebesar 14% di 2024 (Lestari & Winatasari, 2023). Berikut merupakan data jumlah perkembangan balita stunting di Desa Larangan dari tahun ke tahun:

Gambar 1. Perkembangan Balita Stunting di Desa Larangan Tahun 2021-2024



Sumber: Pemerintah Desa Larangan, 2024

Desa Larangan ialah desa yang berlokasi di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Kenaikan stunting pada anak di Desa Larangan yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2021 yaitu sebanyak 22 balita menimbulkan rasa prihatin karena hampir tidak adanya partisipasi masyarakat terkait kendala pandemi yang meningkat pada saat itu. Berbagai strategi telah disusun oleh Pemerintah

Desa Larangan untuk mewujudkan akselerasi penyusutan angka stunting dengan adanya Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 90 Tahun 2021 mengenai Peran Desa Dalam Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Larangan diantaranya yaitu memberikan anggaran pemberian makanan tambahan (PMT) bagi balita, penambahan penyimpanan air bersih serta fasilitasi sanitasi, mengadakan kelas ibu hamil. Berikut adalah data pendukung terkait jumlah balita yang mengalami stunting pada beberapa posyandu yang ada di Desa Larangan:

Tabel 2. Data Kasus Stunting di Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

No.	Posyandu	Jumlah Anak
1.	Anggrek 1	2
2.	Anggrek 4	11
3.	Anggrek 7	1
4.	Anggrek 10	1

Sumber: Pemerintah Desa Larangan, 2024

Merujuk pada data yang sudah dihimpun, dalam tabel diatas bisa dilihat bahwa masih ada 15 balita yang telah beresiko stunting pada tahun 2024. Namun, walaupun sudah dinyatakan menurun dari tahun sebelumnya masih terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan stunting pada balita di Desa Larangan diantaranya belum terbentuknya tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang berkewajiban untuk melangsungkan evaluasi penyelenggaraan percepatan penyusutan stunting pada desa, kurangnya alat untuk memantau tumbuh kembang balita, kurangnya sosialisasi tentang stunting kepada masyarakat desa.

Beberapa studi sebelumnya sudah menjabarkan mengenai strategi pemerintah desa pada upaya menghilangkan stunting. Pertama, studi yang dilangsungkan oleh Asiah Wasillah, Isril, Desthy Nur A.I tahun 2023 dalam penelitian yang berjudul "Strategi Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dalam Pencegahan Stunting di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis". Studi ini berjenis deskriptif melalui penerapan metode kualitatif. Temuan studi menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Mandau dalam upaya pencegahan stunting telah berlangsung secara positif, namun belum mencapai tingkat optimal. Temuan tersebut diakibatkan oleh masyarakat yang masih kurang paham mengenai stunting dan cara-cara yang tepat untuk mencegahnya. Strategi pemerintah dalam pencegahan stunting dibagi menjadi tiga aspek utama: tujuan, lingkungan, dan tindakan. Penelitian ini dan penelitian sebelumnya serupa karena sama-sama mengkaji rencana pemerintah dalam memerangi stunting. Namun objek studi saat ini tidak sama terhadap studi sebelumnya, yakni lebih fokus pada desa, sedangkan objek penelitian sebelumnya lebih fokus pada kecamatan.

Kedua, studi yang dilangsungkan oleh Bedasari, Novita, Azmi, Razali, Wana tahun 2022 dalam penelitian yang berjudul "Strategi Dinas Kesehatan Dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting (Studi Kasus di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun)". Jenis studi ini merupakan deskriptif melalui teknik kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun tidak mampu meminimalisir jumlah stunting pada Desa Pongkar yang meningkat dari 2,76% pada 2019 menjadi 7,6% pada 2020 sebelum kembali meningkat

menjadi 12,8% pada 2021. Tindakan preventif serta pengelolaan stunting di Desa Pongkar belum berlangsung secara optimal karena masyarakat belum sadar akan stunting, dan belum adanya fasilitas dan media yang layak untuk mempermudah program tersebut, kurangnya anggaran, kurangnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya pengetahuan masyarakat umum tentang stunting. Persamaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu strategi pemerintah dalam menanggulangi stunting, lalu perbedaan penelitian sebelumnya menerapkan teori yang dikembangkan oleh David (2015), sedangkan penelitian saat ini menerapkan teori dari Geoff Mulgan (2009).

Ketiga, studi yang dilangsungkan oleh Mediani, Nurhidayah, Lukman (2021), yaitu "Implementasi Strategi Pencegahan Stunting di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019". Studi ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, meskipun teknik pencegahan stunting telah diterapkan dengan sangat baik, beberapa ibu masih menghadapi kendala dalam menerapkan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) karena masalah kesehatan, ketidaktahuan, dan kurangnya dukungan. Terdapat kesamaan antara penelitian ini bersama penelitian sebelumnya. Keduanya memakai teknik kualitatif. Ketidaksamaannya ialah penelitian ini mengamati kebijakan pemerintah dalam mencegah stunting, sedangkan penelitian sebelumnya melihat penerapan upaya pencegahan stunting.

METODE

Metode deskriptif kualitatif diterapkan dalam penelitian ini. Maleong (2012:6) menjabarkan, deskriptif kualitatif adalah suatu proses yang menciptakan data deskriptif yakni ringkasan temuan dari wawancara serta pengamatan pada subjek serta aktifitas yang bisa diobservasi. Dengan menggunakan metode tersebut, peneliti mencoba melihat dan mengungkap situasi sebenarnya seputar rencana pemerintah desa untuk menanggulangi stunting di Desa Larangan. Penelitian ini dilangsungkan pada Desa Larangan Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini mengadopsi model strategi pemerintah yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan pada tahun 2009. Model ini tersusun dari tiga indikator utama, yakni tujuan (*goals*), lingkungan (*environment*), dan tindakan (*action*). Ketiga indikator ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana respons pemerintah desa terhadap masalah stunting anak.

Pendekatan dalam menentukan informan yang diterapkan dalam penelitian ini dikenal sebagai *purposive sampling*. Metode ini melibatkan pemilihan informan berdasarkan evaluasi mendalam terhadap kualitas sampel yang dianggap diperlukan serta relevansi dengan target penelitian yang ingin dicapai. Peneliti melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa informan yang terpilih memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, data yang bersifat non-numerik akan diorganisasikan dan diinterpretasikan, sehingga dapat diolah menjadi informasi yang signifikan. Proses pengolahan informasi ini, yang berfungsi sebagai panduan untuk penelitian lebih lanjut, dikenal sebagai teknik analisis data. Penelitian dilakukan dengan memakai model analisis data yang dicetuskan Miles dan Huberman (1992:16). Prosedur yang terlibat pada tahapan analisis data ialah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Ada dua bagian dalam metode kualitatif, data primer juga data sekunder. Data primer berupa data yang dikumpulkan dari partisipan studi, memanfaatkan instrumen yang dipilih setelah melakukan wawancara dan observasi lapangan. Hasil wawancara bersama sekretaris

desa, bidan desa, kader posyandu, serta masyarakat mengenai strategi pemerintah desa dalam memerangi stunting dimasukkan dalam penelitian data primer ini. Lalu, data sekunder berkaitan dengan data yang dihimpun dari sumber yang telah tersedia, seperti informasi observasi yang diperoleh melalui wawancara serta arsip.

HASIL DAN DISKUSI

Strategi Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Stunting di Desa Larangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 mengenai Percepatan Penurunan Stunting di Desa Larangan merupakan standar sebagai penurunan stunting. Desa Larangan adalah suatu permukiman yang berada pada Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pemerintah Desa Larangan telah menetapkan kebijakan yang mencakup pendanaan pemberian makanan tambahan (PMT) balita, perluasan jangkauan pada air bersih serta sarana sanitasi, dan mengadakan kelas bagi ibu hamil. Untuk dijadikan acuan strategi kajian pemerintah desa untuk menanggulangi stunting, peneliti membuat tiga indikator, yang memakai model strategi pemerintah dari Geoff Mulgan (2009), yang mempunyai indikator antara lain 1) tujuan, 2) lingkungan, dan 3) tindakan. Indikator-indikator tersebut akan dijelaskan seperti berikut:

1. Tujuan Strategi Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Stunting

Mewujudkan generasi yang cerdas, sehat, berkualitas, dan produktif adalah tujuan utama dari upaya penanggulangan stunting ini, khususnya di kalangan balita. Upaya pencegahan dan penanggulangan stunting ini disusun dalam dokumen rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa), kemudian dihimpun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Pada hal ini pemerintah setempat menjadi aparat yang melaksanakan kegiatan, program, dan strategi tersebut. Maka, pemerintah desa Larangan melangsungkan usaha pendampingan pada balita yang terdampak stunting serta keluarga yang beresiko, pemberian dan penyuluhan gizi khususnya pada balita dan ibu hamil.

Melalui setiap kegiatan posyandu, pemerintah desa berdedikasi untuk memberikan dukungan vitamin dan gizi kepada balita dalam upaya membangun keluarga dan anak yang sehat. Melalui dukungan dari bidan desa serta petugas Posyandu, diharapkan program ini dapat efektif dalam mengatasi risiko stunting. Pemerintah desa berharap bahwa melalui intervensi ini, kasus stunting dapat diminimalisir dan penurunan angka stunting dapat tercapai secara signifikan.

Sesuai Pasal 22 PERPRES Nomor 72 Tahun 2021 mengenai Percepatan Penurunan Stunting di Desa, kepala desa harus membentuk tim khusus yang disebut Tim Percepatan Penurunan Stunting guna mempercepat penyusutan stunting di tingkat desa. Segala inisiatif yang berkaitan dengan penghapusan stunting pada tingkat desa harus dikoordinasikan, dan dievaluasi oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting. Dengan adanya tim ini, diharapkan implementasi program penurunan stunting dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan efektif, serta dapat memantau kemajuan dan melakukan penyesuaian strategi sesuai dengan kebutuhan di tingkat desa. Tetapi, di Desa Larangan masih belum terbentuk tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sehingga upaya yang dilakukan untuk penanggulangan dan pencegahan stunting belum berjalan maksimal. Selain itu, kurangnya sosialisasi tentang stunting yang dilangsungkan oleh Pemerintah Desa Larangan kepada masyarakat desa membuat masyarakat desa kurang menyadari akan pentingnya gizi seimbang dan pola asuh yang tepat pada balita untuk mencegah terjadinya stunting.

Temuan ini diperkuat oleh studi sebelumnya yang meneliti mengenai “Strategi Dinas Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Stunting (Studi Kasus Di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun” (Bedasari, Novita, Azmi, Razali, & Wana, 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Pongkar, kerap terdapat balita stunting serta program penanganan dan pencegahan stunting tidak terlaksana secara optimal. Hambatan pada penerapan upaya pencegahan dan penanganan stunting adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya mengembangkan gaya hidup sehat untuk menurunkan jumlah korban stunting.

Fakta diatas jika dikaitkan dengan teori Geoff Mulgan (2009) bahwasannya tujuan memvalidasi dasar pemikiran untuk kebutuhan awal tindakan. Menurut Mulgan (2009), sudut pandang ini menafsirkan bahwa tujuan saat ini dipaksakan pada kita oleh ketidaksesuaian antara keinginan dan ambisi kita dengan kenyataan atau keadaan. Tujuan guna pencegahan dan penanggulangan stunting di Desa Larangan telah menunjukkan bahwa masih terdapat strategi yang belum sepenuhnya terealisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, diperlukan strategi yang tepat agar tujuan akhir tercapai dengan baik.

2. Lingkungan Dalam Penanggulangan Stunting

Lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam memengaruhi perilaku individu dan memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan mereka. Menurut Notoatmodjo (2003), perilaku manusia terbentuk melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya. Dalam hal ini, ketika menganalisis lingkungan, baik internal atau eksternal suatu lembaga, sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana lembaga tersebut mampu merespons berbagai faktor yang memengaruhi. Dalam kasus stunting, terdapat dua aspek utama yang perlu diperhatikan, yakni gizi sensitif serta gizi spesifik. Faktor gizi sensitif sering kali berkaitan dengan kondisi ekonomi, sementara faktor gizi spesifik lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan gizi yang mencakup imunisasi dan lingkungan yang sehat. Hal ini terutama krusial selama periode 1.000 hari pertama kehidupan balita, di mana kondisi gizi dan kesehatan dapat menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak secara keseluruhan.

Ditetapkan bahwa sasaran utama untuk percepatan penurunan stunting ditetapkan di wilayah Desa Larangan. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah desa bekerja sama dengan Bidan Desa, Kader Posyandu, PKK, BPD, LPMD, masyarakat setempat, dan pihak terkait lainnya. Dengan kolaborasi ini, penanggulangan stunting di Desa Larangan dapat dilakukan secara lebih terfokus dan efektif, memastikan upaya yang terintegrasi dan komprehensif dalam menangani isu stunting di wilayah tersebut.

Setiap pemangku kepentingan dalam program ini telah menetapkan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan peran masing-masing. Sebagai contoh, Bidan Desa memiliki tugas utama untuk membantu keluarga dengan menyediakan layanan kesehatan yang diperlukan. Selain itu, kader Posyandu, serta anggota dari organisasi seperti PKK, BPD, dan LPMD, berfungsi sebagai penggerak dan fasilitator dalam memberikan pelayanan kepada keluarga. Mereka bekerja sama untuk memberikan bimbingan dalam pengasuhan balita, dengan tujuan untuk melahirkan anak-anak yang sehat, cerdas, aktif, dan responsif. Dalam kegiatan ini, kader dapat menawarkan berbagai layanan seperti pembicaraan kelompok, konseling, sesi latihan, dan konsultasi kepada orang tua serta keluarga yang memiliki balita. Melalui kolaborasi yang erat antara tenaga kesehatan, khususnya kader mobilisasi dan bidan, serta pemberdayaan keluarga, diharapkan akan terjadi percepatan dalam penurunan angka stunting di Desa Larangan.

Temuan studi ini menjabarkan bahwa aspek lingkungan dalam strategi penanggulangan stunting telah sesuai dengan teori strategi pemerintahan dari Geoff Mulgan (2009). Strategi kelembagaan berfungsi sebagai kerangka pengendalian sumber daya dan kekuasaan yang sudah ada melalui lembaga pemerintah dan organisasi publik untuk kepentingan publik. Melalui peningkatan kolaborasi antar lembaga terkait, termasuk bidan desa, kader Posyandu, PKK, BPD, LPMD, dan masyarakat sekitar. Sinergi antara tenaga medis, pemerintahan desa, dan partisipasi aktif masyarakat sekitar membentuk pondasi yang kokoh dalam implementasi strategi tersebut. Kerjasama antara semua pihak ini sangat berpengaruh untuk mencapai hasil yang optimal dalam penanggulangan stunting yang kompleks secara holistik dan berkelanjutan.

3. Tindakan Yang Diambil Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Stunting

Di Desa Larangan, upaya penanggulangan stunting dilakukan bekerjasama dengan masyarakat dan pemerintah desa, dengan keterlibatan dan harapan pembawa kepentingan dengan terstruktur serta terarah. Pemerintah desa telah menetapkan strategi peningkatan gizi untuk mempercepat penurunan stunting, antara lain:

a. Memberikan anggaran pemberian makanan tambahan (PMT) pada balita

Program pemberian makanan tambahan (PMT) merupakan agenda rutin bulanan yang dilaksanakan oleh kader Posyandu untuk mendukung kesehatan balita. Dalam program ini, makanan tambahan yang diberikan kepada anak-anak berupa produk-produk yang telah diproses, seperti bubur, biskuit, dan berbagai jenis makanan lainnya, dirancang khusus untuk meningkatkan asupan gizi mereka. Selain memastikan bahwa setiap makanan yang diberikan aman dan berkualitas, kegiatan ini juga memperhatikan aspek mutu keamanan pangan. Para kader Posyandu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap jenis makanan yang disediakan memuat nutrisi yang selaras keperluan spesifik masing-masing target. Hal ini penting untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatan balita secara optimal, sehingga diharapkan anak-anak bisa berkembang optimal serta terlepas dari masalah gizi yang dapat menghambat perkembangan mereka di masa depan. Berikut ini adalah menu PMT yang diberikan pada saat kegiatan posyandu:

Gambar 2. Menu Produk PMT untuk balita di Desa Larangan



Sumber: Pemerintah Desa Larangan, 2024

Berdasarkan gambar 2 di atas, sebagai bentuk pemberian makanan tambahan (PMT) di Desa Larangan, prioritas diberikan pada penggunaan bahan makanan lokal seperti kacang hijau, telur,

susu, serta bahan tambahan seperti santan. PMT ini didanai dari APB Desa dan dikelola oleh kader Posyandu. Makanan tambahan yang disediakan, seperti bubur kacang hijau, biskuit, dan telur, diolah untuk memastikan kualitas dan nilai gizi yang optimal, sehingga dapat mendukung pertumbuhan dan kesehatan balita dengan lebih efektif.

Dari fakta diatas sesuai dengan teori Geoff Mulgan (2009) yang menyatakan bahwa ada hukum, aturan, dan kepemimpinan yang mendorong individu untuk turut ikut serta. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 90 Tahun 2021 mengenai Peran Desa dalam Upaya Pencegahan dan Pengurangan Stunting Terintegrasi sudah sesuai dengan teori Geoff mulgan (2009). Pemberian makanan tambahan atau PMT, adalah salah satu strategi untuk mengatasi masalah malnutrisi pada anak. Dalam memastikan efektivitas program, pemberian makanan tambahan di Desa Larangan dilakukan dengan pendekatan berbasis bahan lokal yang tidak hanya mendukung ketersediaan gizi yang sesuai, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan lokal. Bidan desa serta kader posyandu secara aktif memantau dan mengevaluasi kualitas makanan yang disediakan, serta melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan spesifik balita. Dengan pendanaan dari APB Desa, PMT bertujuan dalam mengoptimalkan pertumbuhan dan kesehatan balita, serta memperbaiki status gizi secara menyeluruh.

b. Peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan (2009), tindakan yang diambil merupakan respons terhadap hasil pengamatan yang mengarah pada tindakan lebih lanjut. Pemerintah desa berupaya menyediakan layanan bagi warga di Desa Larangan, salah satu inisiatif yang diluncurkan oleh pemerintah desa adalah pengadaan sarana air bersih serta fasilitas kebersihan. Dengan memastikan bahwa masyarakat tidak menggunakan air yang berkualitas buruk atau fasilitas sanitasi yang tidak memadai, inisiatif ini diharapkan dapat secara tidak langsung mengurangi angka stunting di daerah tersebut. Berikut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Larangan:

Gambar 3. Penggalan Saluran Sarana Sanitasi di Desa Larangan



Sumber: Pemerintah Desa Larangan, 2024

Berdasarkan gambar 3 diatas, dapat dilihat bahwa Pemerintah Desa Larangan telah berusaha keras untuk memastikan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menyediakan akses air

bersih langsung ke pemukiman masyarakat, termasuk pemasangan gratis. Pembangunan septic tank komunal sebagai sarana sanitasi telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Larangan sebagai upaya untuk menjaga lingkungan yang dimulai dari limbah air pembuangan manusia, yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat dan penyebab terjadinya stunting. Pemerintah juga melaksanakan sosialisasi pada warga desa mengenai pentingnya penggunaan air bersih untuk kesehatan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kualitas hidup masyarakat akan meningkat, serta kesehatan anak-anak yang menjadi generasi penerus dapat terjaga dengan baik, sehingga mengurangi risiko stunting.

Pemerintah desa mengacu pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 90 Tahun 2021 mengenai Peran Desa Dalam Upaya Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi. Pasal 29 dari peraturan tersebut menekankan perlunya diskusi terarah dan tindak lanjut yang sistematis untuk pencegahan stunting. Dengan mengikuti pedoman ini, pemerintah desa memastikan bahwa semua langkah yang diambil dalam perbaikan sanitasi dan kebersihan lingkungan berkontribusi secara langsung terhadap penurunan angka stunting. Diskusi terarah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat memfasilitasi pemantauan dan evaluasi yang efektif, serta memungkinkan penyesuaian strategi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Desa Larangan.

c. Mengadakan kelas ibu hamil

Kelas ibu hamil yaitu inisiatif yang dirancang guna meningkatkan kesadaran wanita hamil tentang stunting, dampaknya terhadap kesehatan, serta metode yang dapat diterapkan untuk mencegahnya. Dalam hal ini, kurikulum yang digunakan dalam kelas ibu hamil lebih fokus pada isu stunting dan pentingnya gizi selama kehamilan. Informasi yang disampaikan dalam program ini mencakup berbagai aspek, termasuk teknik pengolahan makanan yang benar, penyusunan menu makanan yang bervariasi, serta pengendalian jumlah zat gizi pada periode kehamilan dan menyusui. Dengan memberikan pengetahuan yang komprehensif mengenai gizi serta pencegahan stunting, diharapkan para ibu hamil dapat mengaplikasikan informasi tersebut, sehingga bukan sekedar meningkatkan kesehatan diri sendiri, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal bagi janin yang dikandung. Program ini berfungsi sebagai sarana penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan bebas dari masalah gizi.

Berlandaskan usia kehamilan, wanita hamil memerlukan asupan energi lebih besar daripada wanita tidak hamil. Penambahan berat badan selama kehamilan merupakan elemen yang dapat menentukan kesehatan. Sangat penting guna mengetahui pertumbuhan berat badan saat kehamilan berlangsung. Apabila pertumbuhan berat badan terlalu banyak, ada risiko bahwa janin dapat mengalami obesitas. Sebaliknya, jika penambahan berat badan kurang dari yang seharusnya, bayi yang dilahirkan berpotensi mengalami kekurangan berat badan. Dalam hal ini, ibu hamil tidak hanya diberikan pendidikan mengenai stunting dan pola makan yang sehat, tetapi juga diajarkan tentang cara memenuhi kebutuhan mikronutrien yang penting. Mikronutrien tersebut termasuk asam folat, zat besi, zink, dan nutrisi lain yang sangat dibutuhkan janin. Dengan pemahaman yang baik tentang kebutuhan gizi selama kehamilan, diharapkan mengurangi risiko masalah kesehatan di masa depan. Dibawah ini adalah pelaksanaan kegiatan kelas ibu hamil yang dilaksanakan di Balai Desa Kantor Desa Larangan:

**Gambar 4. Pelaksanaan Kegiatan Kelas Ibu Hamil
di Desa Larangan**



Sumber: Pemerintah Desa Larangan, 2024

Berdasarkan gambar 4 di atas bahwa keterlibatan kader dalam kelas ibu hamil memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini. Sebagai pendamping bidan, kader diharapkan tidak hanya memiliki pemahaman yang mendalam tentang materi yang akan disampaikan, tetapi juga memiliki komitmen yang tinggi untuk berperan aktif dalam pengelolaan kelas ibu hamil. Dengan cara ini, bidan dapat membantu memperluas pengetahuan kader mengenai pengelolaan kelas yang efektif untuk ibu hamil. Dengan keterampilan dan wawasan yang memadai, kader akan lebih mampu mengelola kelas ibu hamil secara efektif, sehingga dapat mendorong keterlibatan aktif dari para peserta. Hal ini penting agar diskusi yang lebih mendalam mengenai gizi dan pencegahan stunting dapat difasilitasi dengan baik di Desa Larangan. Dengan demikian, melalui kolaborasi antara bidan dan kader, diharapkan akan tercipta lingkungan belajar yang mendukung bagi ibu hamil dalam memahami pentingnya nutrisi dan kesehatan selama masa kehamilan..

KESIMPULAN

Penelitian ini menjabarkan bahwa pendekatan pemerintah Desa Larangan untuk menangani kasus risiko stunting belum dilaksanakan dengan sebaik-baiknya jika dibandingkan dengan model strategi pemerintah Geoff Mulgan (2009), yang mencakup indikator lingkungan, tindakan, dan tujuan. Pertama, tujuan pemerintah desa untuk perwujudan anak dan keluarga sehat bagi kelompok risiko stunting diperkirakan belum sepenuhnya tercapai. Kedua, kemampuan pemerintah desa dalam berkolaborasi bersama lembaga lain yang terkait yakni bidan desa, kader Posyandu, PKK, BPD, LPMD, serta warga setempat dinilai berhasil. Ketiga, pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada balita dinilai berhasil mencegah stunting dan mempercepat perbaikan gizi di Desa Larangan.

Pemerintah desa di Desa Larangan telah melaksanakan berbagai upaya dalam mengatasi risiko stunting diantaranya dengan memberikan vitamin dan bantuan makanan bergizi kepada balita secara rutin dalam setiap kegiatan posyandu, yang didukung oleh manajemen posyandu

yang aktif. Langkah-langkah ini diproyeksikan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai krusialnya mengelola kesehatan guna mencegah terjadinya kasus stunting atau kekurangan gizi terhadap balita. Sejumlah strategi yang diimplementasikan Pemerintah Desa Larangan ialah dengan cara pengalokasian anggaran pemberian makanan tambahan (PMT) pada balita, peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi serta mengadakan kelas ibu hamil sebagai langkah penguatan dalam mencegah kasus resiko stunting di Desa Larangan.

REFERENSI

- Abdillah, S., Angin, R., & Adawiyah, P. R. (2024). Strategi Pemerintah Desa dalam Penanganan Stunting di Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember. *Buletin Antropologi Indonesia*, 1(1), 10. <http://doi.org/10.47134/bai.v1i1.2187>
- Asmawati, Nur Elly, Annuril, K. F., Ratnadhiani, A., Efendi, P., & Yosephine, B. (2023). Optimalisasi Peran Kader dalam Pencegahan Stunting melalui Peningkatan Nutrisi Baduta dan Ibu Menyusui. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(3), 852–863. <http://doi.org/10.31849/dinamisia.v7i3.13147>
- Bedasari, H., Novita, F., Azmi, Razali, M. T., & Wana, I. S. L. (2022). Strategi Dinas Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Penanganan Stunting (Studi Kasus Di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun). *Jurnal Kemunting*, 3(2), 703–722.
- Elvira Dey Putri, V. (2022). Implementasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Stunting Di Kecamatan Alak Kota Kupang. *Community Development Journa*, 165. Retrieved from http://eprints.ipdn.ac.id/14113/1/REPOSITORY_B3_23_VIRGINIA_ELVIRA_DEY_PUTRI.pdf
- Hamdi, S., Dewi Satria Elmiana, Ikmal Maulana, Nurul Haromain, Ihfan Rahmawadi, & Firdaus Abdul Malik. (2023). Pengembangan Model Penanganan Stunting Di Ntb: Studi Kebijakan Di Desa Bilebante, Lombok Tengah. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 18(2), 209–234. <http://doi.org/10.47441/jkp.v18i2.346>
- Izzuddin, R. P., & Widiyarta, A. (2024). Strategi Pemerintah Desa dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, 5(2), 971–986.
- Lestari, P., Pralistami, F., Ratna, D., Hamijah, S., & Harahap, R. A. (2022). Peranan Pemerintah Desa dalam Pencegahan Stunting Di Desa Kencana Kecamatan Balai Jaya Tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 2227. <http://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2789>
- Lestari, R. M., & Winatasari, D. (2023). Peranan Pemerintah Desa Kadirejo Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Ar-Rum Salatiga*, 8(1), 20–31.
- Malia, A., Farhati, F., Rahmah, S., Maritalia, D., Nuraina, N., & Dewita, D. (2022). Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil dalam Upaya Pencegahan Stunting. *Jurnal Kebidanan*, 12(1), 73–80. <http://doi.org/10.35874/jib.v12i1.1015>
- Normaisa, Mahsyar, & Sudarmi. (2021). Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderita Stunting Di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan*, 4(1), 1–2.
- Nur Azizah, Nastia, A. S. (2022). Strategi Dinas Kesehatan dalam menekan laju penderitaan stunting di Kabupaten Buton Selatan. *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(12), 4145–4152.
- Perpres. (2021). Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, (1).
- Priyono, P. (2020). Strategi Percepatan Penurunan Stunting Perdesaan (Studi Kasus

- Pendampingan Aksi Cegah Stunting di Desa Banyumundu, Kabupaten Pandeglang). *Jurnal Good Governance*, 16(2), 149–174. <http://doi.org/10.32834/gg.v16i2.198>
- Pujiastuti, N., Retnowati, L., Div, P., Malang, K., Keperawatan, J., Kemenkes Malang, P., ... Malang, K. (2021). Pelatihan Mipasi Lokal Bagi Kader Posyandu Sebagai Upaya Menurunkan Wasting Dan Stunting Di Desa Balonggabus Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *Prosiding ...*, 2807–9183. Retrieved from <http://ejurnal.poltekkestasikmalaya.ac.id/index.php/Pengmas/article/view/828%0Ahttp://ejurnal.poltekkestasikmalaya.ac.id/index.php/Pengmas/article/view/828/480>
- Putri, F. F., & Sukmana, H. (2022). Strategi Pemerintah Desa dalam Pencegahan Stunting di Desa Kedungkendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 10(2), 224–235. <http://doi.org/10.30656/sawala.v10i2.5168>
- Rahman, H., Rahmah, M., & Saribulan, N. (2023). Upaya Penanganan Stunting Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, VIII(01), 44–59.
- Regita, F. A., & Prathama, A. (2023). Peran Pemerintah Desa Dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 12(1), 121–128.
- Sutraningsih, W., Marlindawani, J., & Silitonga, E. (2021). Implementasi Strategi Pelaksanaan Pencegahan Stunting di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 (The Implementation of Stunting Prevention Strategy in Aceh Singkil District by 2019). *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 7(1), 49–68.
- Viona Erlanda, & Dida Rahmanik. (2023). Strategi Pemerintah Kota Surabaya Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 26(2), 90–97. <http://doi.org/10.30649/aamama.v26i2.160>
- Wasillah, A., Isril, I., & Nur A.I, D. (2023). Strategi Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dalam Pencegahan Stunting di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 4(1), 26–35. <http://doi.org/10.46730/japs.v4i1.94>